



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

e.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja-PD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.

- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V : Penutup
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- g. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- h. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- j. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- k. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;

- p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;
- q. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar;
- r. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- t. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- v. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- w. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- x. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- z. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- aa. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar; dan
- dd. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

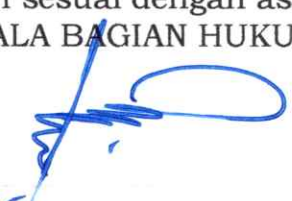
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

5. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2026, Renstra Tahun 2026 - 2030, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat (Musrenbang), Pokok-pokok pikiran DPRD serta inovasi-inovasi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar

Tahun 2018 Nomor 6);

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan; |
| BAB II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan tahun 2025. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, review terhadap rancangan awal RKPD 2026, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat; |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran, menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar; |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan, menguraikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perumusan program dan kegiatan, rekapitulasi dan penjelasan program dan kegiatan; |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut |

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BLITAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
sampai dengan Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K	K
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
					Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	Indeks	0,251	0,255	0,26	101,96	0,251	0,26	101,96	
					Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,78	%	98,13	89,59	98,66	110,12	98,13	98,66	99,88	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	
						Persentase tingkat hunian Rusunawa	95	%	95	95	95	100	95	95	100	
1	04	02	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase data perumahan yang tersusun dan terupdate	90	%	75	80	80	100	85	85	94,44	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	0	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Doku men	-	-	-	-	2	2	50
1	0	0	2	0	0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2	Doku men	-	-	100	2	2	100	
1	0	0	2	0	0	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2	Doku men	-	-	-	1	1	50	
1	0	0	2	0	0	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100	%	100	100	100	100	100	100	
1	0	0	2	0	0	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarel awan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	400	Orang	100	100	100	60	260	65	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	160	Orang	-	-	-	-	40	40	25
1	0	0	2	0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40	Unit	0	6	2	33,33	6	8	20
1	0	0	2	0	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	6	Unit Ruma h	-	-	-	-	1	1	16,67
1	0	0	2	0	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	84,45	Indeks	86,26	86,26	92,42	107,14	86,26	92,42	109,44
1	0	0	2	0	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8	Doku men	1	1	1	100	2	4	50

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	8	Lapora n	-	-	-	-	2		
1	0	0	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73	%	33,91	20,11	30,65	152,41	20,11	84,67	102,34
						Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12	%	1,65	1,03	1,55	150,49	1,03	4,23	102,67
1	0	0	2	0	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	100	%	NA	95	98	103,16	95	98	98
1	0	0	2	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	432	Unit	177	108	185	171,30	100	462	106,94

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300	Orang	100	100	100	100	100	300	100
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23	%	12,09	13,09	2,31	17,65	2,2	16,6	31,78
1	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910	Unit	110	318	189	59,43	207	207	21,79
1	0	0	2	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770	Unit	110	19	21	110,53	19	150	19,48
					Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64	%	76,56	85,64	86,17	102,62	78.19	78.19	91,3
					Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89	%	77,13	79,26	86,29	108,87	79.26	86,29	95,99

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72	%	78,09	76,17	85,10	111,72	85,22	85,22	118,36
						Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66	%	76,17	78,09	87,48	112,02	88,12	88,12	116,47
1	0	0	2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32	Dokum en	4	5	5	100	2	11	34,38
1	0	0	2	0	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8	Lapora n	2	2	2	100	2	6	75
1	0	0	2	0	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si	12	Doku men	NA	1	1	100	1	2	16,67
1	0	0	2	0	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6	Kelom pok Masya rakat	2	2	2	100	2	6	100
1	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.6 63	m	183969, 3	130663	200499,85	153,45	200768,9 1m	200768,91m	142,73
						Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85.66 3	m	104245, 4	73663	119726,55	162,53	120597,3 1	120597,31	140,78

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16	Laporan	2	4	4	100	2	8	50
1	0	0	2	0	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	Dokumen	1	1	1	100	1	3	75
1	0	0	2	0	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	68	Ha	8,54	4,5	11,43	254	4,5	24,47	35,99
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	86	86	87	101,16	88	88	125,71
						Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70	%	87	87	92,5	106,32	97	97	138,57
1	0	0	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475	m	15922,63	17475	16087,46	92,05	16273,21	16273,21	75,78
						Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123	m	28134,82	22123	30030,8	135,74	31476,33	31476,33	130,48

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
								K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	Lokasi	9	4	5	125	3	17	106,25
1	0	0	2	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16	Lapora n	12	4	4	100	4	20	125
						Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A 86,30	A 86,30	A 86,73	100,5	A 86,73	A 86,73	102,55
						Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	Nilai	A 86,30	A 86,30	A 86,73	100,5	A 86,73	A 86,73	102,55
1	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,45	indeks	85,73	85,73	92,42	107,80	90	92,42	109,47
1	0	0	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Doku men	15	15	15	100	15	45	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	3	100	3	9	75
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	Paket	4	4	4	100	4	12	75
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	Paket	31	30	30	103,3	30	91	75,83
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Lapora n	46	40	46	115	40	132	82,5
1	0	0	2	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Doku men	NA	5	5	100	5	10	50
1	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	89	%	86	87	87	100	88	88	98,88
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		-	-	-	-	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan / Sasaran/ Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							K	Satuan	K	K	K	K	K	K	K
1	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	2	3	3	100	8	13	118,18
1	0	0	2		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132	Lapora n	24	24	33	137,5	36	93	70,45
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105	Lapora n	247	264	286	108,33	286	819	74,12
1	0	0	2		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	100	%	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	10	10	10	100	11	10	100
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144	Unit	77	25	25	100	25	127	88,19
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit					1	1	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 realisasi program / kegiatan telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Mekanisme kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mencapai target program dan kegiatan melalui perjanjian kinerja serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya dukungan organisasi terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dari table hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025 maupun Renstra dapat dikatakan berhasil walaupun belum optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Terkait kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No.	INDIKATOR	IKU/IKK/ SPM	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase rumah layak huni	IKU	96,37	96,99	97.61	98.23	97,43	98,13	98,13	98.23	97,4	97,64	
	Persentase perumahan dan Kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	IKU	68,62	73,94	79.26	84.57	76,83	77,13	77,13	84.57	89.89	89.89	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	IKK	16,9	16,9	16,9	16,9	16,176	8,26	4,354	37,08	40,63	43,48	
	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	IKK	236	236	236	236	214	287	178	236	159	163	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IKK	40.761	41.059	41.357	41.655	40550	3077	3077	41.655	41.953	41.953	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tidak dapat terlepas permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan terkait kinerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

- a. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni
- b. Masih tingginya kawasan permukiman rawan kumuh

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas tentunya berdampak pada terhambatnya pencapaian visi misi kepala daerah. Oleh sebab itu perlu dicari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Selain permasalahan dan hambatan, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dihadapkan pada tantangan dan peluang, diantaranya :

- a. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan rumah / perumahan semakin meningkat
- b. Kemungkinan munculnya kawasan permukiman kumuh baru sebagai imbas pertambahan penduduk

Dengan adanya masalah, hambatan, tantangan serta peluang yang dihadapi, telah memunculkan isu-isu penting yang strategis untuk segera ditindaklanjuti. Isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh
2. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Permukiman

Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya prasarana umum (PSU) terutama jalan lingkungan dan saluran drainase pada kawasan kumuh dalam kondisi kurang baik dan masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Blitar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Dalam tahap review terhadap rancangan awal RKPD, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses review ini dilakukan mengingat rancangan awal RKPD perlu disesuaikan dan diubah sesuai dengan kondisi, data dan kebutuhan saat ini. Dari hasil review tersebut terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, diantaranya terdapat tambahan sub sub kegiatan yang sebelumnya tidak ada pada rancangan awal kemudian ditambahkan di rancangan akhir dikarenakan factor kebutuhan dan pentingnya sub tersebut. Beberapa kegiatan juga berbeda dari rancangan awal RKPD terkait besaran nominal kegiatan, misalnya sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang mendapatkan anggaran yang cukup signifikan karena terkait langsung dengan penyediaan rumah layak huni di Kota Blitar.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Blitar

Nama PD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			11.697.743.794,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			15.072.743.794,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	5.277.413.402,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100 %	5.277.413.402,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	11.694.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	15.694.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	3.420.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	3.420.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000,00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.280.800,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.280.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	4.994.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	4.994.000,00	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		2.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.535.593.477,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.535.593.477,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.533.333.477,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.533.333.477,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.260.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.260.000,00	
1.3						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	2.000.000,00	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	2.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	148.200.800,00	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	100 %	148.200.800,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.860.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.860.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	63.340.800,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	63.340.800,00	
1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	319.537.370,00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	100 %	313.537.370,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.869.920,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.869.920,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.466.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.466.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.369.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.369.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	55.833.250,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	49.833.250,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.030.700,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.030.700,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.520.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.520.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2.448.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2.448.000,00	
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	89 %	142.440.180,00	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	89 %	178.562.680,00	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	55.595.080,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 unit	55.595.080,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	86.845.100,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	86.845.100,00	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.122.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	880.909.600,00	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	100 %	880.909.600,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	60.204.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	60.204.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	820.705.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	286 Laporan	820.705.600,00	
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	89 %	239.037.175,00	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	89 %	202.914.675,00	
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	62.276.080,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	1.101.569.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	1.101.569.500,00	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %		
2.1	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	86 %	412.500.000,00	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	86 %	412.500.000,00	<i>Penambahan Amdal Rusunawa</i>
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	402.500.000,00	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	402.500.000,00	Amdal Rusunawa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	20.750.000,00	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	100 %	20.750.000,00	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	3.300.000,00	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Blitar	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	3.300.000,00	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	50 Orang	17.450.000,00	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kota Blitar	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	50 Orang	17.450.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program pemerintah yang disediakan	100 %	120.000.000,00	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program pemerintah yang disediakan	100 %	120.000.000,00	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Ruma	3 Rumah Tangga	85.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Ruma	3 Rumah Tangga	85.000.000,00	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	35.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	35.000.000,00	
2.4	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>		<i>Persentase tingkat hunian rusunawa</i>	95 %	548.319.500,00	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>		<i>Persentase tingkat hunian rusunawa</i>	95 %	548.319.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	66.319.500,00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	66.319.500,00	
	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Kota Blitar	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	482.000.000,00	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Kota Blitar	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	482.000.000,00	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	40,63 %	1.281.200.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	40,63 %	1.281.200.000,00	
			Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh	12,94 %				Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh	12,94 %		
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	1 Dokumen	310.000.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	2 Dokumen	310.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	310.000.000,00	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	2 Dokumen	310.000.000,00	
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase permukiman layak huni	95,29 %	971.200.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Persentase permukiman layak huni	95,29 %	971.200.000,00	
			<i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh</i>	12,94 %				<i>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh</i>	12,94 %		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	367.200.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	367.200.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	25.000.000,00	penataan dan pengelolaan areal pemukiman umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	559.000.000,00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	5 Ha	559.000.000,00	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	8,52 %	2.968.310.850,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	8,52 %	6.343.310.850,00	
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1 Laporan	2.968.310.850,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1 Laporan	6.343.310.850,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 unit	2.598.310.850,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	139 unit	5.973.310.850,00	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit	350.000.000,00	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit	350.000.000,00	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	25 Orang	20.000.000,00	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Orang	20.000.000,00	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase perumahan dengan PSU dalam kondisi baik	91 %	1.069.250.042,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase perumahan dengan PSU dalam kondisi baik	91 %	1.069.250.042,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	8,33 %				Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	8,33 %		
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	1.069.250.042,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	1.069.250.042,00	
			Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %				Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	12.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	12.000.000,00	
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	472.500.042,00	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2 Lokasi	472.500.042,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika tif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	584.750.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	584.750.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

N o	Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Jalan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Jl. Letda Markawi Gang RT.02 RW.02 Lingkungan Ngegong Kel. Gedog 2. Jl. Ciliwung Gg. 1 RT. 02 RW. 02 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1) 1392.5637 m ² 2) 702.548 m ²	Diakomodir
2	Pasang Paving stone	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jl. Asahan Gg. III RT.02 RW.05 Kel. Pakunden (Jalan Menuju Makam)	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1082 m ²	Belum merupakan asset pemkot
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersebar di Kota Blitar	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	PB = 1 PK = 25 Listrik = 1	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, arah kebijakan pembangunan daerah dalam bidang perumahan rakyat di daerah mencakup peningkatan akses terhadap perumahan layak, aman, dan terjangkau, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- (5) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (6) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (7) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- (8) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan fasilitas umum dasar dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (9) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan arah kebijakan : Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang dilaksanakan dengan Program Prioritas : Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman dengan program 3 juta rumah. Ditahun 2026 dengan sasaran :

- ✓ meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU dengan indicator :
 1. Jumlah Unit rumah baru yang terbangun 41.250 unit
 2. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya 300.000 unit
 3. Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan PSU 200.000 unit
- ✓ Meningkatnya perumahan public vertical yang disediakan secara terpadu dengan indicator :
 1. Jumlah penyediaan unit hunian vertical yang terpadu (milik dan sewa) 7500 unit
- ✓ Meningkatnya pelaksanaan bantuan kemudahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan dengan indicator :
 1. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi / kemudahan perumahan 315.000 rumah tangga
- ✓ Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu dengan indicator :
 1. Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu 304 Ha.

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni;
- (2) pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- (3) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 3 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakatberpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga; penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tagga;
- (4) terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga; bantuan stimulant pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga;
- (5) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga;
- (6) mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
- (7) peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- (8) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 -2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KET
					2024	2025	2026	2027	
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Permukiman yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses hunian layak adalah hunian yang memenuhi persyaratan rumah layak huni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; Hunian Terjangkau dihitung dari backlog kepemilikan dan hunian; Hunian berkelanjutan adalah hunian yang terpenuhi PSU berdasarkan Perda PKP Kota Blitar	(Persentase hunian layak + Persentase hunian terjangkau + Persentase hunian berkelanjutan)/ 3 Persentase hunian layak = jumlah rumah tangga dengan hunian layak / jumlah rumah tangga x 100% Persentase hunian terjangkau = jumlah rumah terbangun / kebutuhan rumah x 100 % Persentase hunian berkelanjutan = (jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan akses PSU layak / Jumlah rumah tangga) x 100 %	79,03	91	92,49	94,19	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, syarat kecukupan luas minimum bangunan, serta syarat kesehatan dan kenyamanan penghuni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023	Rasio rumah layak huni = (jumlah rumah layak huni) / (jumlah penduduk)	0,257	0,259	0,259	0,259	IKU
		Persentase Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai perda PKP.	(Luas kawasan kumuh / luas kawasan permukiman) x 100 %	5,99	5,35	4,71	4,07	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KET
					2024	2025	2026	2027	
			Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan,						
		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan yang dimaksud disini adalah perumahan komersil atau perumahan pengembang; Kawasan permukiman yang dimaksud adalah kawasan permukiman kumuh PSU layak adalah prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar teknis	$\frac{\text{Persentase perumahan dengan PSU layak} + \text{Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak}}{2}$ $\text{Persentase perumahan dengan PSU layak} = \frac{\text{jumlah perumahan dengan PSU layak}}{\text{jumlah perumahan}} \times 100 \%$ $\text{Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak} = \frac{(\text{luas kawasan kumuh yang ditangani PSU nya})}{\text{luas kawasan kumuh}} \times 100 \%$	43,75	48,70	52,06	59,28	IKU
	Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga. IKM diukur melalui survei yang melibatkan responden dari masyarakat yang menerima layanan tersebut.	Nilai IKM pada tahun bersangkutan	92,42	84	84,5	85	

Tabel 3.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

VISI : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN				
MISI : MEWUJUDKAN KOTA BLITAR SEHAT DAN SEJAHTERA				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan kualitas PSU di Kawasan Permukiman Kumuh	1. Menyediakan Data Kawasan Permukiman Kumuh 2. Menyediakan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh 4. Menyediakan PSU di Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman
		Pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Penyediaan data pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat	Program Pengembangan Perumahan
			2. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kota	
			3. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	
			4. Peningkatan Kualitas Rusunawa	
		Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1. Penyediaan data Rumah Tidak Layak Huni 2. Pelaksanaan Rehabilitasi rehab rumah tidak layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Kawasan Permukiman
		Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan permukiman	1 Penyediaan dan rehabilitasi PSU di Perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

*Tabel strategi dan arah kebijakan mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 - 2029

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk mendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, pada tahun 2026 mengakomodir 5 Program, 16 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.072.743.794,00,-.

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2026 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1							
1	04						
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1	04	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1	04	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
1	04	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	<i>*Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029</i>
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program pemerintah yang disediakan	
1	04	02	2.03	0007	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	
1	04	02	2.03	0008	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase tingkat hunian rusunawa	
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1	04	02	2.05	0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh	<i>*Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029</i>
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase permukiman layak huni Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	<i>*Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029</i>
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik Persentase perumahan dengan PSU dalam kondisi baik	<i>*Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029</i>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	

**Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”, dijabarkan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif
2. Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan
6. Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendukung prioritas pembangunan yaitu Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2026 - 2030, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Strategi OPPKPKE	Prioritas Perangkat Daerah	Program
Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”	Optimalisasi penanggulang an kemiskinan	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Pemenuhan SPM Perumahan, Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Rumah Swadaya, Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan, Penyediaan PSU	Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan PSU

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Rumah Layak Huni sesuai Standar	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	o Perlu adanya koordinasi antar OPD dalam merencanakan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	o Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	o Memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk mencapai visi misi kepala daerah dan tujuan serta sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dijabarkan melalui program dan kegiatan teknis yang berisi indikator kinerja, target serta pendanaan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM serta pendayagunaan potensi yang ada di daerah.

Pada tahun 2026 jumlah program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sejumlah 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 48 (empatpuluh delapan) sub kegiatan. Lokasi program dan kegiatan adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Kota Blitar. Untuk dana/pagu indikatif bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil.

Untuk rumusan program dan kegiatan tahun 2026 secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			15.072.743.794,00				15.112.324.415,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.072.743.794,00				15.112.324.415,00	
1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			15.072.743.794,00				15.112.324.415,00	
1	0 4	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku		100 %	5.277.413.402,00			100 %	5.926.643.510,00
1	0 4	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	15.694.800,00			100%	46.280.432,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	1.020.000,00
1	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	3.420.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		17 Laporan	3.488.400,00
1	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Data	2.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Data	2.200.000,00
1	0	0	2.0	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	2.280.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Berita Acara	2.372.032,00
1	0	0	2.0	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	4.994.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		13 Dokumen	35.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	001	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	2.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Berita Acara	2.200.000,00
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.535.593.477,00			100%	3.879.244.347,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang/bulan	3.533.333.477,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang/bulan	3.876.939.147,00
1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.260.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		12 Laporan	2.305.200,00
1	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 %	2.000.000,00			-	2.200.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	2.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)			2.200.000,00
1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	148.200.800,00			100%	153.619.200,00
1	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	84.860.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	86.557.200,00
1	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 orang	63.340.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 orang	67.062.000,00
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	313.537.370,00			100%	384.808.117,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.869.920,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	4.967.318,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	30.466.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Paket	31.075.830,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	10.369.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Paket	10.576.380,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	49.833.250,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30 Paket	50.829.915,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	15.030.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Paket	15.331.314,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Laporan	200.520.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		40 Laporan	254.530.400,00
1	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	2.448.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		4 Dokumen	17.496.960,00
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		89 %	178.562.680,00			91%	211.682.464,00
1	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	55.595.080,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	73.100.462,00
1	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	86.845.100,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	88.582.002,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	36.122.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		0 Unit	50.000.000,00
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	880.909.600,00			100%	1.024.955.080,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	60.204.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		36 Laporan	63.214.200,00
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286 Laporan	820.705.600,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		286 Laporan	961.740.880,00
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		89 %	202.914.675,00			91%	223.853.870,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	62.276.080,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Unit	63.683.844,00
1	0	0	2.0	000			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	74.892.795,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	78.048.865,00
1	0	0	2.0	000			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	8.078.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	17.500.000,00
1	0	0	2.0	000			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	40.667.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Unit	41.480.748,00
1	0	0	2.0	001			Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	23.140.413,00
1	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	8.078.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	17.500.000,00
1	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	40.667.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		25 Unit	41.480.748,00
1	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	17.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit	23.140.413,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)		100 % 100 %	1.101.569.500,00			100 % 100 %	2.618.001.862,00
1	0	0	2.0		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate		86 %	412.500.000,00			88%	1.210.200.000,00
1	0	0	2.0	000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	402.500.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	1.000.000.000,00
1	0	0	2.0	000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	205.100.000,00
1	0	0	2.0	000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	5.100.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi		100 %	20.750.000,00			100%	21.165.000,00
1	0	0	2.0	000 1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	3.300.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Orang	3.366.000,00
1	0	0	2.0	000 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	17.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		40 Orang	17.799.000,00
1	0	0	2.0		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program pemerintah yang disediakan		100 %	120.000.000,00			100%	122.400.000,00
1	0	0	2.0	000 7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Rumah Tangga	85.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		3 Rumah Tangga	86.700.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rumah Tangga	35.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Rumah Tangga	35.700.000,00
1	0	0	2.0		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase tingkat hunian rusunawa		95 %	548.319.500,00			95%	1.264.236.862,00
1	0	0	2.0	000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	66.319.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	67.645.890,00
1	0	0	2.0	000	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	482.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	1.196.590.972,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh		40,63 % 98,37 %	1.281.200.000,00			43,48 % 98,58 %	1.506.824.000,00
1	0	0	2.0		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun		2 Dokumen	310.000.000,00			2 Dokumen	316.200.000,00
1	0	0	2.0	000 8	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalis asi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	310.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	316.200.000,00
1	0	0	2.0		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase permukiman layak huni Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh		95,29 % 12,94 %	971.200.000,00			96.57 (%) 20.69%	1.190.624.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Rumah	367.200.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		20 Unit Rumah	374.544.000,00
1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	25.500.000,00
1	0	0	2.0	000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	20.400.000,00
1	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Ha	559.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Ha	770.180.000,00
1	0	0			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh		8,52 %	6.343.310.850,00			8,52 %	3.380.400.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh		1 Laporan	6.343.310.850,00			1 Laporan	3.380.400.000,00
1	0	0	2.0	000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139 Unit Rumah	5.973.310.850,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		200 Unit Rumah	2.940.000.000,00
1	0	0	2.0	000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	350.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		10 Unit	420.000.000,00
1	0	0	2.0	000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		50 Orang	20.400.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik Persentase perumahan dengan PSU dalam kondisi baik		8,33 % 76,92 %	1.069.250.042,00			8,33% 80,48%	1.680.455.043,00
1	0	0	2.0		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase tempat pemakaman umum yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100 % 100 %	1.069.250.042,00			100% 100%	1.680.455.043,00
1	0	0	2.0	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0 12.000.000,0	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	0 12.240.000,0
1	0	0	2.0	001 1	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	472.500.042,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Lokasi	881.950.043,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2006				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	0	0	2.0	001	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	584.750.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Lokasi	786.265.000,00
	4	5	1	2									

**Indikator Program mengacu pada Renstra Dinas PRKP Tahun 2025 -2029*

Dengan fokus pada :

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diantaranya :

1. Masih terdapatnya infrastruktur permukiman yang kondisinya kurang baik sehingga rawan menimbulkan permukiman kumuh terutama di kawasan padat penduduk, hal ini dikarenakan perkembangan persoalan penataan kawasan permukiman sehingga diterbitkan Keputusan Walikota Blitar nomor 188/338/HK/410.010.2/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Blitar.
2. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Blitar baik di dalam permukiman kumuh maupun di luar permukiman kumuh
3. Kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Dalam menghadapi permasalahan di atas, terdapat beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infrastruktur permukiman, peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta.
2. Menangani percepatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui dana APBN dengan menerapkan konsep skema peningkatan keswadayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedang yang melalui APBD melalui Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh dan di Luar kawasan Kumuh dengan konsep skema yang sama dengan dana dari pemerintah pusat yaitu peningkatan keswadayaan masyarakat.
3. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

Selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar juga menyusun manajemen resiko untuk mengawal pencapaian target yang telah direncanakan, dari hasil penyusunan didapatkan bahwa resiko tertinggi yang harus dihadapi adalah MBR yang mengundurkan diri dari Program karena kurangnya kemampuan swadaya masyarakat dan MBR merasa tidak mampu melanjutkan pembangunan rumah. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilaksanakan sosialisasi sebelumnya dan juga menggali kembali kebiasaan gotong royong di masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026.

Rencana Kerja tahun 2026 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2026 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a) Catatan Penting

Penyusunan Renja tahun 2026 terpengaruh oleh terbitnya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, urusan perumahan dan Kawasan permukiman untuk mendukung Astacita Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dengan arah kebijakan Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

b) Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaannya,
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

c) Rencana Tindak Lanjut

Dalam pencapaian kinerja maka akan diupayakan hal – hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun lembaga lainnya untuk pencapaian target indikator kinerja;
2. Mengupayakan sumber anggaran di luar APBD Kota Blitar seperti DAK, BSPS, CSR, Swadaya Masyarakat dan lain-lain.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.